



**INKLUSIVITAS PARTISIPASI POLITIK LOKAL: ANALISIS
KETERLIBATAN KELOMPOK MARGINAL DALAM PENYUSUNAN
PERATURAN DAERAH DI KOTA MATARAM**

*Inclusivity of Local Political Participation: Analysis of Marginal Group
Involvement in The Drafting of Regional Regulations in Mataram City*

Ayatullah Hadi*¹, Iwan Tanjung Sutarna², Ajai Saputra³, Hidayatullah⁴

^{1,2,3,4}Universitas Muhammadiyah Mataram

*Email: hadi.ayatullah@yahoo.co.id

Abstract

This study aims to analyze the involvement of marginalized groups in the formulation of regional regulations (Perda) in Mataram City within the framework of inclusive local political participation. This study uses a qualitative method with a Systematic Literature Review (SLR) approach to scientific articles published in the last five years (2021–2025) and available in the Dimensions and Scopus databases. Only literature that meets the eligibility criteria—including topic relevance, journal reputation, and full-text availability—is systematically analyzed. The results of the study show that the participation of marginalized groups, such as female heads of households, people with disabilities, and indigenous communities, is still hampered by structural and cultural factors. Existing participatory mechanisms are symbolic and not substantively inclusive. Although digital technology offers the potential to expand participation, its implementation still faces challenges in terms of social justice and cultural sensitivity. This study recommends the need to integrate the principles of intersectionality, social justice, and participatory evaluation in the formulation of Perda. This study contributes to filling the literature gap on inclusive local political participation and offers a new direction for regional policies that are more transformative and responsive to the needs of vulnerable groups.

Keywords: Political Party Participation, Marginal Groups, Regional Regulation Formulation

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keterlibatan kelompok marginal dalam penyusunan peraturan daerah (Perda) di Kota Mataram dalam kerangka inklusivitas partisipasi politik lokal. Studi ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan Systematic Literature Review (SLR) terhadap artikel-artikel ilmiah yang dipublikasikan dalam lima tahun terakhir (2021–2025) dan tersedia dalam database Dimensions dan Scopus. Hanya literatur yang memenuhi kriteria kelayakan—termasuk relevansi topik, reputasi jurnal, dan ketersediaan teks lengkap—yang dianalisis secara sistematis. Hasil studi menunjukkan bahwa partisipasi kelompok marginal, seperti perempuan kepala keluarga, penyandang disabilitas, dan komunitas adat, masih dihambat oleh faktor struktural dan kultural. Mekanisme partisipatif yang ada bersifat simbolik dan belum inklusif secara substantif. Meskipun teknologi digital menawarkan potensi perluasan partisipasi, implementasinya masih menghadapi tantangan dalam aspek keadilan sosial dan sensitivitas budaya. Penelitian ini merekomendasikan perlunya integrasi prinsip interseksionalitas, keadilan sosial, dan evaluasi partisipatif dalam perumusan Perda. Studi ini berkontribusi pada pengisian celah literatur tentang partisipasi politik lokal yang inklusif dan menawarkan arah baru bagi kebijakan daerah yang lebih transformatif dan responsif terhadap kebutuhan kelompok rentan.



Kata Kunci: *Partisipasi Partai Politik, Kelompok Marginal, Penyusunan Peraturan Daerah*

PENDAHULUAN

Partisipasi politik lokal merupakan fondasi utama dalam membangun sistem pemerintahan yang inklusif dan demokratis. Konsep ini merujuk pada keterlibatan aktif warga negara dalam proses pembuatan keputusan publik, termasuk dalam perumusan regulasi dan kebijakan yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat. Dalam kerangka desentralisasi di Indonesia, peraturan daerah (Perda) menjadi instrumen penting bagi pemerintah daerah untuk merespons kebutuhan lokal secara spesifik dan mendorong kesejahteraan masyarakat. Namun, efektivitas partisipasi dalam proses ini tidak hanya ditentukan oleh keberadaan forum-formal demokrasi, tetapi juga oleh kapasitas dan aksesibilitas masyarakat untuk berpartisipasi secara bermakna, terutama kelompok yang secara historis termarginalkan (Pratama & Subandi, 2023).

Kelompok marginal dalam konteks kebijakan lokal mencakup individu atau komunitas yang mengalami hambatan struktural dan kultural dalam mengakses ruang partisipasi, seperti perempuan kepala keluarga, penyandang disabilitas, komunitas adat, hingga masyarakat miskin kota. Hambatan yang mereka hadapi bukan hanya bersifat material, tetapi juga psikososial, seperti ketimpangan akses informasi, tidak adanya organisasi pendukung, serta perasaan terasing akibat tidak terpenuhinya kebutuhan psikologis akan otonomi, kebermaknaan, dan kompetensi. Ketika kebutuhan ini tidak terpenuhi, partisipasi menjadi semakin sulit tercapai dan menghasilkan eksklusi berlapis yang berdampak pada rendahnya keterwakilan dalam pengambilan keputusan publik (Bruch et al., 2023).

Peraturan daerah (Perda) memiliki posisi strategis sebagai instrumen kebijakan publik yang digunakan oleh pemerintah daerah untuk menjawab kebutuhan lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, efektivitasnya sangat dipengaruhi oleh proses implementasi, tingkat partisipasi publik, serta karakteristik sosial-politik wilayah setempat. Dalam konteks seperti di Bandar Lampung, keberadaan regulasi yang bertujuan menjaga ketertiban tidak mampu diterapkan secara optimal akibat lemahnya sanksi dan kebijakan pendukung (Hutasuhut et al., 2022). Di sisi lain, Perda juga memiliki potensi besar dalam memberdayakan ekonomi lokal, seperti di Indramayu, di mana regulasi diarahkan untuk mendorong pertumbuhan UMKM dan kemandirian ekonomi masyarakat (Suhendar et al., 2022). Partisipasi aktif warga, seperti di Humbang Hasundutan, menjadi faktor krusial agar regulasi benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan konteks lokal (Naibaho & Siburian, 2022).

Keterlibatan kelompok marginal dalam proses kebijakan mencerminkan realitas yang kompleks dan multidimensional. Banyak dari mereka menghadapi hambatan struktural seperti minimnya akses terhadap informasi, serta ketiadaan organisasi pendukung yang dapat mengadvokasi kepentingan mereka (Ro'fah et al., 2022). Selain itu, faktor psikologis seperti tidak terpenuhinya rasa memiliki dan kompetensi dapat mengakibatkan keterasingan dari ruang partisipatif. Namun demikian, ada dinamika positif yang muncul ketika keterlibatan dibangun melalui identitas kolektif dan solidaritas komunitas, seperti yang terjadi pada komunitas religius minoritas yang meningkatkan partisipasi melalui kesamaan pengalaman (Nojan, 2022). serta proyek visual partisipatif yang berhasil memberdayakan

masyarakat meskipun menghadapi keterbatasan sumber daya (Black & Sykes, 2022).

Tantangan terhadap partisipasi tidak hanya bersifat individual, tetapi juga sistemik dan kultural. Secara struktural, banyak lembaga yang belum memiliki kerangka kerja untuk mendukung partisipasi inklusif, termasuk terbatasnya akses terhadap transportasi, pengasuhan anak, dan waktu yang fleksibel untuk mengikuti kegiatan public (Naheed et al., 2021). Kebijakan yang ada pun sering kali belum sensitif terhadap kebutuhan kelompok rentan, sehingga memperparah eksklusi (Nadeau et al., 2022). Di sisi kultural, norma sosial dan bias sejarah turut melemahkan kepercayaan terhadap institusi, terutama di kalangan perempuan dan komunitas adat. Rendahnya kompetensi budaya dari penyelenggara kegiatan partisipatif juga menghambat keterlibatan yang bermakna (Castellon-Lopez et al., 2022). Kendati demikian, tantangan ini juga membuka ruang bagi reformasi dan pendekatan inovatif yang lebih adil dan responsif.

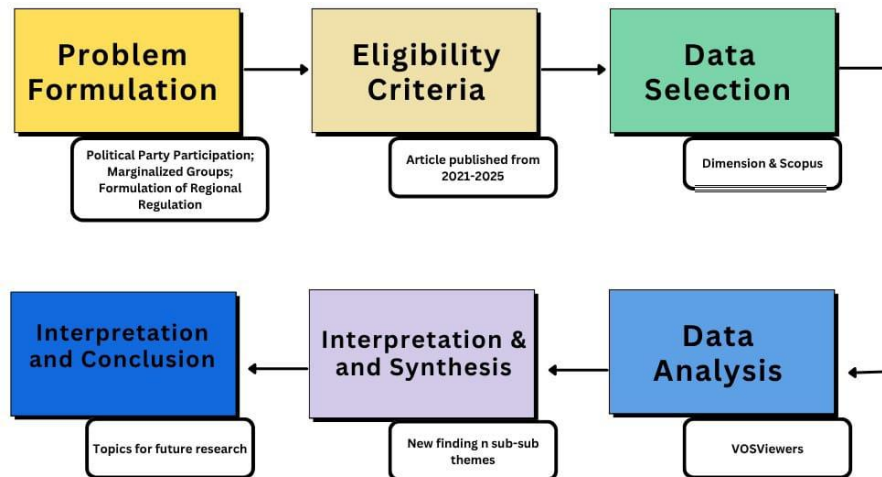
Meskipun berbagai penelitian telah menyoroti pentingnya partisipasi publik dan tantangan yang dihadapi kelompok marginal, belum banyak kajian yang secara spesifik mengeksplorasi bagaimana kelompok ini terlibat dalam proses penyusunan *Perda* di tingkat kota, terutama dalam konteks budaya dan sosial-politik seperti di Kota Mataram (Nusamuda et al., 2025). Kesenjangan ini penting untuk diisi mengingat posisi strategis *Perda* sebagai kanal utama representasi kepentingan lokal. Penelitian ini menawarkan kontribusi dengan menganalisis secara kritis dinamika keterlibatan kelompok marginal dalam penyusunan *Perda* di Kota Mataram, dengan fokus pada faktor struktural, kultural, dan kelembagaan yang memengaruhi inklusivitas partisipasi politik lokal. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi hambatan dan peluang partisipatif bagi kelompok marginal serta merumuskan strategi kebijakan yang mendukung keterlibatan mereka secara substantif dalam proses legislasi daerah.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan *Systematic Literature Review* (SLR). Metode ini digunakan untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan menginterpretasikan semua hasil penelitian yang relevan mengenai Inklusivitas Partisipasi Politik Lokal: Analisis Keterlibatan Kelompok Marginal dalam Penyusunan Peraturan Daerah di Kota Mataram. Pendekatan ini bertujuan untuk mengumpulkan dan menganalisis data dari berbagai sumber yang relevan secara sistematis, sehingga dapat memberikan pemahaman yang mendalam mengenai topik yang diteliti. Data dalam penelitian ini bersumber dari database Dimensions (<https://app.dimensions.ai>) dan Scopus (<https://www.scopus.com>) dengan interval publikasi 5 tahun terakhir untuk memastikan bahwa data yang digunakan adalah data terkini dan relevan dengan Inklusivitas Partisipasi Politik Lokal: Analisis Keterlibatan Kelompok Marginal dalam Penyusunan Peraturan Daerah di Kota Mataram.

Kriteria kelayakan data dalam penelitian ini ditetapkan untuk memastikan bahwa hanya literatur yang relevan dan berkualitas tinggi yang dianalisis. Kriteria tersebut meliputi (1) artikel ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal nasional dan internasional bereputasi; (2) studi yang secara khusus membahas Inklusivitas Partisipasi Politik Lokal: Analisis Keterlibatan Kelompok Marginal dalam Penyusunan Peraturan Daerah di Kota Mataram; (3) publikasi yang diterbitkan

dalam 5 tahun terakhir (2021-2025); (4) artikel yang tersedia dalam bentuk teks lengkap dan dalam bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Prosedur penelitian seperti yang ditunjukkan pada Gambar 1.



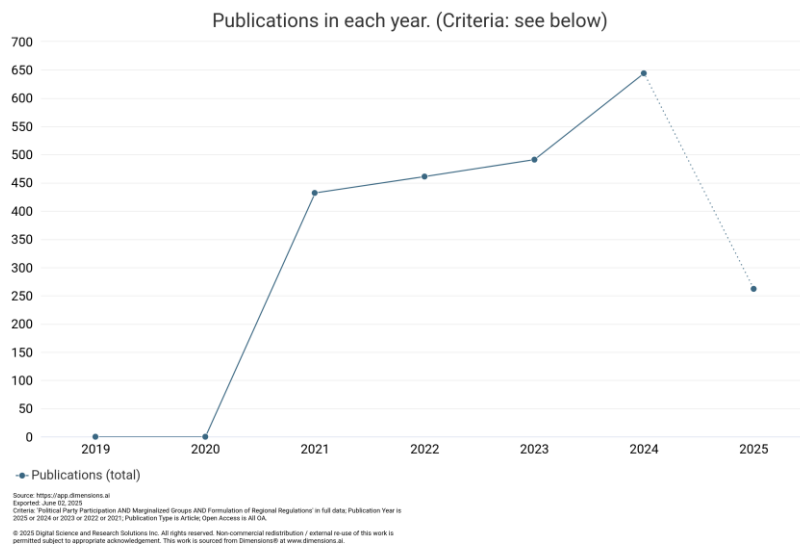
Gambar 1. Prosedur penelitian

Gambar 1 menunjukkan bahwa penelitian ini dilakukan dalam beberapa tahap, yaitu perumusan masalah, penentuan kriteria kelayakan, seleksi data, analisis data, interpretasi dan sintesis data, dan penarikan kesimpulan. Tahap perumusan masalah penting dilakukan untuk membatasi topik yang dibahas, yaitu Inklusivitas Partisipasi Politik Lokal: Analisis Keterlibatan Kelompok Marginal dalam Penyusunan Peraturan Daerah di Kota Mataram. Kriteria kelayakan ditentukan untuk menyaring data yang sesuai dengan topik dengan kata kunci yang relevan seperti “(Partisipasi Partai Politik AND Kelompok Marginal AND Penyusunan Peraturan Daerah) OR (*Political Party Participation AND Marginalized Groups AND Formulation of Regional Regulations*)”. Selanjutnya, data dipilih dari database Dimensi dan filter diterapkan untuk data yang diterbitkan dalam 5 tahun terakhir (2021-2025). Selanjutnya, data yang terkumpul diimpor ke dalam perangkat lunak VOSviewer untuk membuat visualisasi hubungan antara kata kunci dan tema dalam penelitian ini. Hasil visualisasi dan analisis data dari VOSviewer diinterpretasikan untuk menjelaskan variabel-variabel kunci dalam Inklusivitas Partisipasi Politik Lokal: Analisis Keterlibatan Kelompok Marginal dalam Penyusunan Peraturan Daerah di Kota Mataram.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Seleksi Data

Hasil pencarian di database pengindeks menemukan total 166,965 data, meliputi data *open access* sebanyak 19,057 data dan sisanya adalah *close access*. Dari 19.057 data tersebut, terdapat 6,971 data merupakan artikel dan 12,086 data merupakan buku dan prosiding. Dengan demikian, terdapat 2,290 data yang akan dianalisis pada tahap selanjutnya. Sebaran jumlah data tersebut sesuai dengan Gambar 2.



Gambar 2. Distribusi jumlah data selama satu dekade

Gambar 2 menunjukkan bahwa adanya peningkatan yang signifikan sejak tahun 2020, di mana tercatat hampir 450 publikasi. Peningkatan ini mengindikasikan bahwa isu yang dikaji mulai memperoleh perhatian akademik yang lebih besar, kemungkinan sebagai respons terhadap dinamika sosial-politik atau kebijakan inklusif yang menyoroti posisi kelompok marginal dalam proses pengambilan keputusan. Tahun 2021 dan 2022 memperlihatkan tren pertumbuhan yang stabil, yang kemudian mencapai puncaknya pada tahun 2023 dengan total publikasi sekitar 650. Konsistensi publikasi dalam rentang waktu tersebut mencerminkan proses konsolidasi wacana akademik, di mana isu yang sebelumnya bersifat perifer mulai terintegrasi ke dalam arus utama kajian ilmiah. Hal ini ditandai dengan peningkatan intensitas diskusi teoretis, penguatan pendekatan metodologis, serta diversifikasi perspektif analisis dalam penelitian yang relevan. Namun, pada tahun 2024 terjadi penurunan jumlah publikasi secara signifikan, yang kemudian disusul oleh penurunan yang lebih tajam pada tahun 2025. Penurunan ini sangat mungkin disebabkan oleh keterbatasan teknis, seperti belum tuntasnya proses indeksasi atau keterlambatan input data dalam sistem basis data ilmiah. Dengan demikian, angka publikasi pada dua tahun terakhir tidak dapat dijadikan indikator substantif atas menurunnya minat atau relevansi akademik terhadap isu yang bersangkutan. Secara keseluruhan, grafik ini menunjukkan bahwa isu yang dikaji mengalami perkembangan yang cukup pesat dan signifikan dalam ruang akademik, dengan kecenderungan menuju pelembagaan dalam literatur ilmiah yang responsif terhadap tuntutan keadilan sosial dan inklusivitas kebijakan publik.

Visualisasi Jaringan Data

Data yang telah melalui proses seleksi kemudian divisualisasikan dengan menggunakan VOSviewer untuk melihat variabel-variabel penelitian dan hubungan antar variabel. Hasil visualisasi seperti yang ditunjukkan pada Gambar 3.

1. Dinamika Partisipasi Politik Lokal di Kota Mataram

Representasi kelompok marginal dalam forum perumusan Peraturan Daerah (Perda) merupakan elemen krusial dalam menjamin hak-hak mereka serta memastikan aspirasi mereka terdengar secara substansial. Sayangnya, representasi ini masih menghadapi berbagai tantangan struktural dan kultural. Salah satu tantangan utama adalah ketiadaan kerangka regulasi yang spesifik dan memadai untuk menjamin keberadaan dan keterlibatan kelompok marginal dalam proses legislasi daerah. Studi tentang keberadaan "Pak Ogah" di Yogyakarta, misalnya, menunjukkan tidak adanya peraturan teknis yang mengatur representasi mereka, yang berdampak pada lemahnya dukungan institusional (Adhi, 2022). Selain itu, ketimpangan dalam proses hukum seringkali menjadi penghambat partisipasi, terutama bagi kelompok perempuan dan penyandang disabilitas yang kerap menghadapi bias struktural dalam akses terhadap keadilan (Muhammad Roshiku et al., 2023). Dalam konteks ini, representasi yang bersifat substantif menjadi penting, yaitu yang tidak sekadar menghadirkan kelompok marginal secara simbolik, tetapi juga mengakomodasi keragaman pengalaman mereka melalui pendekatan interseksional (Siow, 2023).

Kualitas representasi juga sangat bergantung pada kerja kolektif institusi, bukan hanya pada individu perwakilan semata (Leahy & Ferri, 2023). Pendekatan kolektif memungkinkan pemenuhan kebutuhan lintas kelompok marginal secara lebih menyeluruh. Pengalaman dari riset kesehatan juga menunjukkan pentingnya strategi rekrutmen yang terencana dan inklusif dalam menjangkau kelompok rasial dan etnis minoritas, sebagaimana dibuktikan dalam studi mengenai partisipasi penderita Parkinson dari kelompok terpinggirkan (Di Luca et al., 2023). Namun demikian, partisipasi yang efektif seringkali terhambat oleh kendala struktural seperti minimnya kebijakan yang mendukung, terbatasnya dana dan sumber daya, serta struktur organisasi yang kaku (Duke et al., 2023). Tantangan ini diperparah oleh hambatan kultural berupa stereotip negatif dan eksklusivitas historis, terutama terhadap masyarakat adat, anak-anak, serta penyandang disabilitas yang secara sistematis dikeluarkan dari proses pengambilan keputusan (Laforgue et al., 2022).

Berdasarkan temuan-temuan tersebut, dapat diinterpretasikan bahwa partisipasi politik lokal yang inklusif membutuhkan reformasi menyeluruh baik dalam dimensi kelembagaan maupun budaya. Dalam konteks Kota Mataram, dinamika partisipasi kelompok marginal dalam penyusunan Perda mencerminkan kecenderungan yang serupa-di mana kehadiran mereka sering bersifat formalistik dan tidak diiringi dengan dukungan struktural yang memadai (Rulah et al., 2023). Selain itu, belum adanya mekanisme afirmatif yang spesifik untuk kelompok rentan seperti perempuan kepala keluarga, penyandang disabilitas, dan komunitas adat lokal memperkuat kesenjangan representasi. Oleh karena itu, diperlukan strategi partisipasi yang lebih substansial, interseksional, dan terlembagakan agar partisipasi politik lokal tidak hanya menjadi simbol demokrasi, tetapi menjadi instrumen keadilan sosial yang nyata.

2. Inovasi Teknologi dan Aksesibilitas Informasi Partisipatif

Meskipun perkembangan teknologi digital memberikan peluang besar dalam meningkatkan akses suara publik, kenyataannya ketimpangan digital dan ketidaksetaraan sosial masih menjadi penghambat utama partisipasi kelompok marginal. Di kawasan Asia Selatan, misalnya, Pakistan tertinggal dalam aspek inklusi digital dibandingkan India dan Bangladesh, menunjukkan bahwa kerentanan

sosial sangat berkorelasi dengan eksklusi digital (Rafiq, 2023). Kondisi ini diperburuk selama pandemi COVID-19, di mana keluarga berpendapatan rendah dan komunitas termarginalisasi di Singapura mengalami keterbatasan akses terhadap teknologi digital, sehingga memperlebar kesenjangan sosial (Ng et al., 2023). Di sisi lain, individu dengan disabilitas intelektual menghadapi hambatan besar dalam menggunakan teknologi karena desain yang tidak inklusif, menegaskan perlunya pendekatan berbasis desain berpusat pada pengguna (Murphy et al., 2022). Di Amerika Serikat, praktik digital redlining secara sistematis menutup akses internet broadband bagi komunitas berpendapatan rendah, yang berimbas pada ketimpangan akses kesehatan, pendidikan, dan pekerjaan (McCall et al., 2022).

Keterbatasan dalam teknologi partisipatif juga tampak dalam inisiatif Open Government Data (OGD) yang belum sepenuhnya efektif dalam meningkatkan partisipasi publik. Banyak platform OGD gagal menyediakan data yang memadai dan ramah pengguna, seperti tercermin dalam evaluasi platform data lingkungan di Amerika Serikat, di mana hanya 20% negara bagian mencapai skor memadai dalam hal aksesibilitas dan kemudahan penggunaan (Fusi et al., 2023). Namun demikian, keberhasilan beberapa platform seperti portal data terbuka Kota Milan menunjukkan bahwa desain antarmuka yang menarik dan visualisasi yang canggih mampu meningkatkan keterlibatan publik secara signifikan (Giuseppe Sindoni, 2021). Selain itu, strategi gamifikasi dan pelibatan komunitas lokal—seperti penggunaan badge digital dalam proyek sains warga atau pengumpulan data di Kota Turin—telah terbukti mendorong partisipasi dan menumbuhkan rasa kepemilikan terhadap data (Bruch et al., 2023).

Dari temuan-temuan ini, dapat disimpulkan bahwa inovasi teknologi hanya akan efektif dalam meningkatkan partisipasi jika disertai dengan prinsip inklusivitas dan keberpihakan pada kelompok rentan. Dalam konteks “Inovasi Teknologi dan Aksesibilitas Informasi Partisipatif”, penting bagi pemerintah daerah, termasuk Kota Mataram, untuk memastikan bahwa platform partisipasi digital dirancang dengan mempertimbangkan keberagaman kebutuhan warganya. Implementasi teknologi partisipatif yang sensitif terhadap kesenjangan sosial, seperti penyediaan akses bagi penyandang disabilitas atau masyarakat miskin kota, akan menentukan sejauh mana teknologi benar-benar dapat memperluas ruang partisipasi warga secara demokratis dan setara. Inisiatif seperti OGD perlu ditopang oleh strategi edukatif dan teknis agar tidak hanya menjadi alat administratif, melainkan juga sarana pemberdayaan.

3. Integrasi Keadilan Sosial dalam Desain Kebijakan Lokal

Peraturan Daerah (Perda) memiliki peran penting dalam membentuk norma sosial dan hukum yang memengaruhi kelompok rentan. Di satu sisi, Perda dapat memberikan perlindungan hukum bagi komunitas marginal, tetapi jika tidak dirancang secara sensitif dan inklusif, regulasi ini berpotensi memperkuat diskriminasi dan stigma sosial (Havrylenko & Renov, 2023).

Dalam konteks kesehatan publik, ketidaktepatan strategi komunikasi dapat memperburuk kerentanan kelompok tertentu. Seperti yang terjadi selama pandemi COVID-19, komunitas rentan kesulitan memahami pesan kesehatan publik akibat pendekatan komunikasi yang tidak disesuaikan secara budaya dan linguistik (Jepson et al., 2022). Selain itu, pelabelan kelompok sebagai “rentan” tanpa mempertimbangkan keragaman latar belakang sosial-ekonomi dapat menimbulkan

ageisme dan paternalistik dalam kebijakan layanan publik, sehingga mengabaikan penyebab struktural dari kerentanan itu sendiri (Langmann, 2023).

Dalam merancang kebijakan lokal yang adil, penting untuk mempertimbangkan prinsip-prinsip keadilan distributif seperti utilitarianisme, kesetaraan, dan kebutuhan (de Ruiter et al., 2024). Studi di Vietnam menunjukkan bahwa pendekatan utilitarian secara konsisten menghasilkan kebijakan adaptasi yang paling stabil dan disukai, karena memaksimalkan kesejahteraan kolektif di tengah kesenjangan kapasitas individu (Jafino et al., 2022). Sementara itu, dalam konteks pembangunan infrastruktur publik, pendekatan berbasis kebutuhan lebih diterima oleh masyarakat dibanding kesetaraan atau utilitarianisme (Chung, 2023). Karena dianggap lebih adil dalam mengalokasikan sumber daya (Schmid et al., 2021). Studi lain di Chiapas, Meksiko, memperlihatkan bahwa prinsip keadilan dalam distribusi manfaat program berbasis komunitas sangat dipengaruhi oleh norma lokal, seperti hak milik dan kontribusi individu (Izquierdo-Tort et al., 2022). Hal ini menegaskan bahwa desain kebijakan publik harus mempertimbangkan konteks sosial-budaya secara spesifik agar keadilan benar-benar dapat terwujud.

Integrasi keadilan sosial dalam desain kebijakan lokal, termasuk dalam formulasi Perda, menuntut keseimbangan antara prinsip moral universal dan nilai-nilai lokal. Dalam konteks Kota Mataram, misalnya, penetapan Perda yang berkaitan dengan kelompok rentan harus memperhatikan sensitivitas budaya dan kebutuhan spesifik warga, seperti lansia, perempuan, penyandang disabilitas, dan masyarakat adat. Prinsip keadilan berbasis kebutuhan harus menjadi dasar alokasi sumber daya dan layanan publik, tanpa mengabaikan keinginan untuk mencapai kesejahteraan kolektif secara efisien. Evaluasi terhadap Perda yang telah diterapkan juga penting dilakukan untuk menilai dampaknya secara langsung terhadap kelompok rentan, agar kebijakan tidak hanya menjadi produk hukum formal, melainkan juga instrumen transformasi sosial yang substantif.

KESIMPULAN

Temuan-temuan tersebut menegaskan bahwa partisipasi politik lokal yang inklusif di Kota Mataram masih menghadapi tantangan struktural dan kultural yang serius. Mekanisme partisipasi yang ada cenderung simbolik dan belum sepenuhnya berpihak pada kelompok marginal, seperti perempuan kepala keluarga, penyandang disabilitas, dan komunitas adat. Inovasi teknologi, meskipun menjanjikan sebagai sarana perluasan partisipasi, hanya akan efektif apabila dirancang dan diimplementasikan dengan prinsip keadilan sosial dan inklusivitas yang kuat. Oleh karena itu, desain kebijakan lokal, termasuk Perda, harus secara sadar mengintegrasikan prinsip kebutuhan, sensitivitas budaya, dan evaluasi partisipatif agar benar-benar menjadi alat transformasi sosial yang adil.

Penelitian mendatang perlu difokuskan pada pengembangan model partisipasi digital yang interseksional dan inklusif, serta evaluasi dampak kebijakan lokal terhadap kelompok rentan secara longitudinal, guna memastikan keberlanjutan keadilan sosial dalam tata kelola pemerintahan daerah.

DAFTAR PUSTAKA

Adhi, A. (2022). Pak Ogah dan Kegagalan Representasi Politik Kaum Pinggiran di Kota Yogyakarta. *Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa*, 3 (2), 104–116. <https://doi.org/10.47134/villages.v3i2.32>



- Black, G. F., & Sykes, P. (2022). Steps Toward Engagement Integrity: Learning From Participatory Visual Methods in Marginalized South African Communities. *Frontiers in Public Health*, 10 (June), 1–11. <https://doi.org/10.3389/fpubh.2022.794905>
- Bruch, F., Bartoschek, T., Pesch, M., Schwering, A., & Buchem, I. (2023). Motivating Environmental Citizen Scientists and Open Data Acquisition on Opensensemap With Open Badges. *International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences - ISPRS Archives*, 48 (4/W7-2023), 11–17. <https://doi.org/10.5194/isprs-archives-XLVIII-4-W7-2023-11-2023>
- Castellon-Lopez, Y., Landovitz, R., Ntekume, E., Porter, C., Bross, R., Hilder, R., Lucas-Wright, A., Daar, E. S., Chavez, P., Blades, C., Carson, S., Morris, D., Vassar, S., Casillas, A., & Brown, A. (2022). A Community Partnered Approach for Diversity in COVID-19 Vaccine Clinical Trials. *Journal of Clinical and Translational Science*. <https://doi.org/10.1017/cts.2022.471>
- Chung, H. (2023). When utilitarianism dominates justice as fairness: an economic defence of utilitarianism from the original position. *Economics and Philosophy*, 39 (2), 308–333. <https://doi.org/10.1017/S0266267122000098>
- de Ruitter, A., Dekking, S., Leget, C., & Dronkers, P. (2024). Balancing words, balancing lives: framing vulnerability in times of crisis. *International Journal of Care and Caring*, 8 (2 Special issue), 365–383. <https://doi.org/10.1332/239788221X16782989603397>
- Di Luca, D. G., Macklin, E. A., Hodgeman, K., Lopez, G., Pothier, L., Callahan, K. F., Lowell, J., Chan, J., Videnovic, A., Lungu, C., Lang, A. E., Litvan, I., Schwarzschild, M. A., & Simuni, T. (2023). Enrollment of Participants from Marginalized Racial and Ethnic Groups: A Comparative Assessment of the STEADY-PD III and SURE-PD3 Trials. *Neurology: Clinical Practice*, 13 (1), 1–8. <https://doi.org/10.1212/CPJ.0000000000200113>
- Duke, K., Gleeson, H., Dabrowska, K., Dich Herold, M., Rolando, S., & Thom, B. (2023). Building Cultures of Participation: Involving Young People in Contact with the Criminal Justice System in the Development of Drug Interventions in the United Kingdom, Denmark, Italy and Poland. *Youth Justice*, 23 (1), 97–116. <https://doi.org/10.1177/14732254221075206>
- Fusi, F., Zhang, F., & Liang, J. (2023). Unveiling environmental justice through open government data: Work in progress for most US states. *Public Administration*, 101 (3), 1088–1114. <https://doi.org/10.1111/padm.12847>
- Giuseppe Sindoni, F. (2021). La produzione laniera a Prato nel basso Medioevo. *Un Panno Medievale Dell'azienda Pratese Di Francesco Datini. Studio e Ricostruzione Sperimentale*, 25–51. <https://doi.org/10.36253/fup>
- Havrylenko, O. A., & Renov, I. V. (2023). Formation and development of prerequisites for international legal protection of vulnerable population groups: historical and legal discourse. *Uzhhorod National University Herald. Series: Law*, 2 (76), 202–211. <https://doi.org/10.24144/2307-3322.2022.76.2.33>
- Hutasuhut, U. M., Zuhraini, Z., Hermanto, A., & Triono, T. (2022). Problematika Implementasi Kebijakan Kota Bandar Lampung dalam Mewujudkan Ketentraman dan Ketertiban Umum: Perspektif Siyasa Dusturiyah. *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law*, 2 (2), 133–148.



- <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v2i2.12961>
- Izquierdo-Tort, S., Corbera, E., Martin, A., Lillo, J. C., & Dupras, J. (2022). Contradictory distributive principles and land tenure govern benefit-sharing of payments for ecosystem services (PES) in Chiapas, Mexico. *Environmental Research Letters*, 17 (5). <https://doi.org/10.1088/1748-9326/ac6686>
- Jafino, B. A., Kwakkel, J. H., & Klijn, F. (2022). Evaluating the distributional fairness of alternative adaptation policies: a case study in Vietnam's upper Mekong Delta. *Climatic Change*, 173(3-4), 1-20. <https://doi.org/10.1007/s10584-022-03395-y>
- Jepson, M., Whittaker, G. A., Robins, L., Long, K. M., Williams, C. M., Russell, G., Hill, K. D., Callaway, L., Hlavac, J., Willoughby, L., & Haines, T. P. (2022). Australian public health COVID-19 messaging is missing its mark in some vulnerable communities and people who reject COVID-19 safety advice. *Journal of Global Health*, 12. <https://doi.org/10.7189/jogh.12.05037>
- Laforgue, N., Sabariego, M., Ruiz, A., & Cano-hila, A. B. (2022). An Intersectional Analysis of Child and Adolescent Inclusion in Local Participation Processes. *Social Inclusion*, 10(2), 66-74. <https://doi.org/10.17645/SI.V10I2.5094>
- Langmann, E. (2023). Vulnerability, ageism, and health: is it helpful to label older adults as a vulnerable group in health care? *Medicine, Health Care and Philosophy*, 26(1), 133-142. <https://doi.org/10.1007/s11019-022-10129-5>
- Leahy, A., & Ferri, D. (2023). Barriers to cultural participation by people with disabilities in Europe: a study across 28 countries. *Disability and Society*, 39(10), 2465-2487. <https://doi.org/10.1080/09687599.2023.2222898>
- McCall, T., Asuzu, K., Oladele, C. R., Leung, T. I., & Wang, K. H. (2022). A Socio-Ecological Approach to Addressing Digital Redlining in the United States: A Call to Action for Health Equity. *Frontiers in Digital Health*, 4(July), 1-8. <https://doi.org/10.3389/fdgh.2022.897250>
- Muhammad Roshiku, Desa, & Tengah, L. (2023). *Budaya Hukum Penyelesaian Perkara Berbasis Restorative*. 3(1), 61-72.
- Murphy, E., Shiels, O., Yap, M. L., Angus, F. C., Delaney, J., Hogan, B., Burke, C., Heduan, D., Breslin, D., & Fiori, S. (2022). "I Feel Proud That with This App We Can Help Other People with Intellectual Disabilities": The Role of an Expert by Experience Digital Inclusion Citizen Advisory Panel. *Disabilities*, 2(4), 715-735. <https://doi.org/10.3390/disabilities2040050>
- Nadeau, L., Gaulin, D., Johnson-Lafleur, J., Levesque, C., & Fraser, S. (2022). The challenges of decolonising participatory research in indigenous contexts: the Atautsikut community of practice experience in Nunavik. *International Journal of Circumpolar Health*, 81(1). <https://doi.org/10.1080/22423982.2022.2087846>
- Naheed, K., Zaheer, N., Shah, M., & Durrani, A. (2021). Women's Participation in Politics and Decision-Making Process of Pakistan: Challenges and Barriers. *Humanities & Social Sciences Reviews*, 9 (1), 185-196. <https://doi.org/10.18510/hssr.2021.9120>
- Naibaho, A., & Siburian, K. (2022). Public Participation in the Establishment of Regional Regulation in Humbang Hasundutan Regency. *International Journal of Social Sciences Review*, 3 (2), 12-27. <https://doi.org/10.57266/ijssr.v3i2.97>



- Ng, I. Y. H., Lim, S. S., & Pang, N. (2023). Making universal digital access universal: lessons from COVID-19 in Singapore. *Universal Access in the Information Society*, 22 (3), 1073–1083. <https://doi.org/10.1007/s10209-022-00877-9>
- Nojan, S. (2022). Racialized Religion and Civic Engagement: Insights into Intra-Muslim Racial Diversity on University Campuses. *Sociology of Religion: A Quarterly Review*, 83 (1), 36–59. <https://doi.org/10.1093/socrel/sraa043>
- Nusamuda, I., Yudhi, P., Rahmad, L., Indra, H., & Adi, A. (2025). Empowering Generasi Milenial Berbasis Kepemimpinan Digital Pada Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Kota Mataram Empowering the Millennial Generation Based on Digital Leadership at the Muhammadiyah Students Association In Mataram City Abstrak Transformasi digit. *Transformasi: Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*, 5 (1), 123–132.
- Pratama, I. N., & Subandi, A. (2023). Transformasi Good Governance dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik di Kota Mataram. *Seminar Nasional II LPPM UMMAT 2023*, 2 (April), 1–13.
- Rafiq, M. I. (2023). Bridging the Digital Divide through Social Inclusion: A Cross-Country Analysis Study of Pakistan, India and Bangladesh. *Journal of Economic Impact*, 5 (1), 69–75. <https://doi.org/10.52223/jei5012308>
- Ro'fah, R., Hanjarwati, A., & Suprihatiningrum, J. (2022). The Long Road to Social Inclusion: Participation of Vulnerable Groups in Village Development. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat: Media Pemikiran Dan Dakwah Pembangunan*, 6 (2), 225–284. <https://doi.org/10.14421/jpm.2022.062-05>
- Rulah, K., Pratama, I. N., & Amil, A. (2023). Quadruple Helix Concept in Improving Community Living Standard Through the Development of Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) in Rempek. *Jurnal Ilmiah*, 9 (4), 3083–3089. <https://doi.org/10.58258/jime.v9i1.6018/http>
- Schmid, S., Vetschera, R., & Lienert, J. (2021). Testing Fairness Principles for Public Environmental Infrastructure Decisions. *Group Decision and Negotiation*, 30 (3), 611–640. <https://doi.org/10.1007/s10726-021-09725-2>
- Siow, O. (2023). What Constitutes Substantive Representation, and Where Should We Evaluate It? *Political Studies Review*, 21 (3), 532–538. <https://doi.org/10.1177/14789299231154864>
- Suhendar, S., Kusumah, R. R., & Salidja, S. (2022). Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Dan Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Kabupaten Indramayu. *Yustitia*, 8 (1), 107–121. <https://doi.org/10.31943/yustitia.v8i1.154>

